

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) TERHADAP PEMERINTAHAN DI DESA TOINI
KECAMATAN POSO PESISIR
KABUPATEN POSO**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna memperoleh gelar sarjana
Sosial pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sintuwu Maroso**

Oleh

FEBRY PURWANA
NPM : 91811405171010

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN I

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATANDESA (BPD)
TERHADAP PEMERINTAHAN DI DESA TOINI
KECAMATAN POSO PESISIR
KABUPATEN POSO**

OLEH

FEBRY PURWANA

NPM : 91811405171010

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Sosial Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sintuwu Maroso**

POSO 1 Juni 2022

Pembimbing I



Dr.Suwardhi Panthi, S.Sos.,MM

Pembimbing II



Immanuel N. Tadanugi,S.IP.M.Si

**Mengetahui
Ketua Jurusan Administrasi Publik**



Fitria Y. Alim , S.Sos.,M.Si

NIDN.0929097904

HALAMAN PENGESAHAN II

Telah di terima oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, setelah dipertanggung jawabkan dalam Ujian Skripsi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2022.




Panitia Ujian :

Ketua/Penguji : Drs. Alif Y. Walenta, M.PA

Sekretaris/Penguji : Abd Khalid Hs Pandipa, S.Sos.,M.Si


Anggota/Penguji : Fitria Y. Alim, S.Sos.,M.Si

Majelis Tim Penguji :

1. Drs. Alif Y. Walenta, M.PA (..........)
2. Sapruni, S.Sos.,M.Si (.....)
3. Dr. Suwardhi Pantih, S.Sos., MM (..........)
4. Imanuel N Tadanugi, S.IP.,M.Si (..........)

Poso, 16 Juni 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik.



Drs. Alif Y. Walenta., M.PA
NIDN.0906066401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diteliti sebelumnya untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Sintuwu Maroso maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan dan rumusan dari saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan masukan dari Tim Penguji
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasian orang lain, kecuali yang telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dan di sebutkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak bernaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Poso, 28 Mei 2022
Yang membuat pernyataan



FEBRY PURWANA
NPM. 91811405171010

ABSTRAKSI

FEBRY PURWANA. 2022. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.* Dibimbing oleh Suwardhi Pantih dan Imanuel N Tadanugi.

Kata Kunci : Pengawasan BPD Desa Toini Kecamatan PosoPesisir Kabupaten Poso.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. Di karenakan beberapa permasalahan salah satunya adalah kurang efektifnya pengawasan BPD dalam mengawasi pemerintahan dan masih kurangnya hubungan kerja sama antara Kepala Desa dengan anggota BPD. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kualitatif deskriptif, yaitu Pengumpulan data dengan di lakukannya Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun landasan teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori menurut Maringan (2004:62) yaitu: Yang pertama adalah Pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpul data atau informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran organisasi. Yang kedua Pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar organisasi untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga Pengawasan preventif, yaitu pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kerja. Dan yang keempat Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Hasil dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa BPD di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso sudah melaksanakan pengawasan desa sesuai dengan Perundang-undangan Nomor 06 tahun 2014, tetapi demikian masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi pengawasan BPD di desa Toini seperti masih kurangnya komunikasi antara BPD dan aparat desa.

KATA PENGANTAR

Bismillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sesuai dengan tuntunan karya ilmiah, di sebabkan keterbatasan pengetahuan yang di miliki dan penyerapan pengkajian masalah di lapangan sudah tentu banyak mengaami berbagai hambatan dan rintangan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus di penuhi oleh seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1).

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak, baik berupa dorongan moril maupun bantuan materil khususnya kepada Bapak Dr. Suwardhi Pantih, S.Sos.,MM sebagai Pembimbing I dan Bapak Imanuel N. Tadanugi,S.IP.M.Si sebagai Pembimbing II. Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr.Suwardhi Pantih, S.Sos., MM. selaku Rektor Universitas Sintuwu Maroso Poso atas pembinaan dan kesempatan yang di berikan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Sintuwu Maroso Poso dalam melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1).
2. Bapak Drs.A.Y.Walenta, M.PA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Sintuwu Maroso Poso, yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

3. Wakil Dekan Fakultas Administrasi Publik Universitas Sintuwu Maroso Poso. Bapak Abd. Khalid Hs, Pandipa, S.Sos., M.Si. yang banyak memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi.
4. Kepada Ibu Fitria Y. Alim, S.Sos., M.Si, ketua program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Sintuwu Maroso Poso.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Sintuwu Maroso Poso. Dan juga kepada Kepala Desa, Ketua BPD, Serta Aparatur Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso yang telah memberikan izin serta dukungan yang Maa Sya Allah dalam pelaksanaan penelitian di Desa Toini, serta memberikan informasi dan data yang di butuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua tersayang kepada Abba Al-Mahmud Manda Ummah Niha beserta kedua kakak kembar penulis Iqbal dan Ikmal yang telah senantiasa mendukung penulis selama pendidikan yang di tempuh, terima kasih atas jerih payah dalam memberikan bantuan moril dan materil serta mendidik dan membesarkan penulis juga menjadi motivasi penulis menyelesaikan skripsi ini ALHAMDULILLAH.
7. Kepada teman-teman saya Al-Ukhty Sholehah, Ka Balqis (ummu unaisah), Ka Alfiyyah, Ka Tsaqifah, Rumaisho, Marwah, Rahmatias, Adinda dan, Syakiroh. Jazakunnallahukhoiron atas dukungan dan doa-doanya, canda tawanya Maa Sya Allah begitu menghibur di kala penulis merasa penat dalam penyusunan skripsi ini.

8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sintuwu Maroso Poso, Kepada Nursidar, Zulmy Pratiwi, Sri Wulandari, dan Siti Zaenab atas segala bantuan baik moril maupun materil yang penulis terima selama ini, penulis do'akan semoga Allah yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan Rahmat-nya kepada kita sekalian. Aamiin, Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Poso, 15 Mei 2022
Penulis



Febry purwana
91811405171010

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Definisi Kepengawasan.....	9
2. Jenis Kepengawasan.....	11
3. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	13
4. Prinsip-Prinsip Pengawasan.....	13
5. Teknik Pengawasan.....	14
6. Metode Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan....	17
7. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	18
8. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	20

9. Persyaratan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	21
10. Hak dan Kebijakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	22
11. Definisi Pemerintah Desa.....	23
12. Fungsi Pemerintah Desa.....	24
B. Landasan Teoritis dan Kepustakaan.....	27
C. Alur Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe dan Dasar Penelitian	29
1. Tipe Penelitian	29
2. Dasar Penelitian	29
B. Definisi Konsep.....	30
C. Jenis Data	30
D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	31
E. Instrument Penelitian	32
F. Analisis Data	32
G. Lokasi Penelitian.....	34
H. Waktu dan Tujuan Penelitian	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskriptif Lokasi Penelitian.....	36
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian.....	48
C. Faktor – faktor yang Mempengaruhi.....	53
1. Kurangnya komunikasi kerja	53
2. Kurang berlangsungnya sanksi	53
3. Sistem Pengawasan yang Masih Kurang	53
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

1. Rencana Waktu Penelitian.....	34
2. Sarana dan Prasarana.....	37
3. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	39
4. Sejarah Pemerintahan Desa.....	40

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa adalah unit utama dalam mendukung daerah setempat dan memimpin penting untuk kemajuan, semuanya setara. Oleh karena itu, upaya membentengi kota merupakan tahapan untuk mempercepat penerimaan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-susunan organisasi pemerintahan, sehingga desa mempunyai kedudukan untuk mengarahkan dan mengurus kepentingan daerah setempat.

Dalam melaksanakan kemerdekaan provinsi, akan bergantung pada status legislatif daerah untuk menyusun kerangka pemerintahannya untuk membuat kemajuan yang menarik, produktif, lugas, dan bertanggung jawab serta mendapatkan dukungan dari daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. administrasi. Dalam pelaksanaan pembenahan desa, penting untuk mengkoordinir suatu perkumpulan yang dapat menggerakkan daerah setempat untuk memiliki pilihan untuk ikut serta melakukan kemajuan kota dan menyelesaikan organisasi desa. Dengan demikian, diyakini pergantian peristiwa dan pelaksanaan penataan kota akan berjalan lebih wajar, bukan hanya karena permintaan-permintaan mendalam yang sulit dilegitimasi (Suwignjo, 1982:1).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengertian desa adalah sebagai berikut: desa atau nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan wilayah yang sah yang mempunyai batas-batas wilayah yang disahkan untuk menguasai dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan daerah sekitarnya dengan memperhatikan penggerak daerah setempat, kebebasan memulai, serta hak-hak istimewa konvensional yang dirasakan dan diperhatikan dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi pasal 1 ayat 43) sebagaimana dimaksud oleh Widjaja dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 di atas, jelas kota merupakan daerah yang mandiri, yaitu daerah yang mengatur dirinya sendiri. Bahwa kota memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengurus kepentingan daerahnya sesuai dengan keadaan dan keadaan sosial sosial terdekat, tempat kota yang telah bersertifikat kemerdekaan sangat vital sehingga memerlukan pertimbangan yang disesuaikan mengenai pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah desa dalam menyelesaikan kewajibannya dan menawarkan jenis bantuan kepada daerah harus benar-benar fokus pada hubungan asosiasi yang berfungsi dalam organisasi administrasinya. Organisasi di lingkungan pemerintah desa bermaksud agar dalam menyelesaikan tugas perbaikan memiliki pilihan untuk menawarkan jenis bantuan kepada daerah, semua perangkat pemerintah desa, baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) harus benar-benar memahami batas yang menjadi wewenang dan kewajiban masing-masing(Widjaja, 2010).

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu yayasan yang melakukan pekerjaan pemerintahan yang perseorangnya merupakan utusan dari penduduk kota mengingat gambaran wilayah yang belum sepenuhnya ditetapkan untuk mengurus kepentingan daerah setempat(Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum. 2015:215).

Pembicaraan tentang BPD dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 209 menyebutkan bahwa BPD memiliki kemampuan menyusun pedoman kota, yang dapat menjabat dengan batas waktu 2 (dua) kali masa jabatan. Selanjutnya dalam regulasi yang sedang berjalan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 yang termuat dalam Pasal 55 dimaklumi bahwa BPD memiliki 3 (tiga) kemampuan, khususnya memeriksa dan menetapkan rancangan peraturan kota dengan Kepala Kota, mewajibkan dan mengalihkan kerinduan daerah kota, dan mengarahkan pameran kepala kota. Dengan demikian, BPD dapat menjabat selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berurutan maupun tidak.

Dengan cara seperti itu, pelaksanaan pemerintahan kota yang kuat sangat penting. Pemerintah kota adalah lembaga yang memainkan peran cukup besar dalam membangun dan mengawasi pemerintahan di kota. Pemerintah kota sebagai pemimpin di kota mengambil bagian yang berfungsi dalam menentukan strategi dan melakukan kemajuan di kota. Juga, pemerintah kota harus membangun asosiasi dengan BPD, daerah rahasia dan daerah setempat.

Kota Toini merupakan salah satu kota yang berada di pinggiran pantai kecamatan Poso dimana mata pencaharian pokoknya adalah peternak dan pemancing, pemerintah daerah Poso menempatkan lahan pertanian sebagai salah satu kebutuhan pokok yang harus dikembangkan.

Di sini kita bisa melihat bahwa persiapan dalam membina sebuah kota adalah sesuatu yang vital. Hal ini juga tak terpisahkan dari sifat pameran prakaitan mekanik pemerintah kota itu sendiri untuk membuat dan memberikan kepercayaan lokal. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah kota untuk memenuhi kerinduan daerah setempat dengan mengikutsertakan BPD dalam mengatur pembenahan kota. BPD sebagai subjek administrasi dalam pemerintahan kota merupakan salah satu sarana bagi daerah untuk mengatur pemerintahan kota. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kewenangan pemerintah kota akan menjadi tolak ukur kemajuan hasil perbaikan kota. Dengan demikian akan menumbuhkan penggerak daerah dan pengembangan diri serta efektif ikut membantu BPD dalam mengelola perangkat pemerintahan kota.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mendapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam hal peranan BPD dalam mengawasi pemerintah desa di Desa Toini kecamatan Poso Pesisir, yaitu kurang berjalannya fungsi kepengawasan BPD selaku badan legislatif pengawasan desa dalam mengawasi aparatur desa, kurang berjalannya hubungan kerjasama yang baik antara kepala desa dan BPD, kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan sistem

pemerintah desa yang bersifat tidak demokratis. Keempat permasalahan di atas terjadi karna kurangnya komunikasi antar petugas pemerintah desa Selain itu, kekecewaan terhadap sistem sentral demokrasi, khususnya strategi atau pedoman yang diberikan tidak dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa dan kerangka pemerintahan desa yang tidak demokratis, dalam banyak kasus tidak adanya transparansi antara BPD dan Pemerintah desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. BPD memiliki kemampuan penting dalam memutuskan kebijakan desa dan pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena merupakan badan pengawasan desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah mungkin merupakan pembenaran utama mengapa BPD harus ditata. Upaya pengawasan diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan di Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir Kab.Poso?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui sejauhmana pengawasan BPD terhadap Pemerintahan di desa Toini kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.
- b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan BPD terhadap Pemerintahan di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintah desa di dalam lembaga pendidikan dan juga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sintuwu Maroso Poso.
- b. Diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan aparatur desa Toini, untuk menambah informasi dan pengetahuan bagaimana kepengawasan BPD terhadap aparatur desa Toini kecamatan Poso Pesisir kabupaten Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khairul, *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*, Unri Pers, Pekanbaru, 2003
- Agustino, leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta. Hlm.193-196
- A.W Widjaya. 2003. *Pemerintahan desa/marga*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djarwanto, 1998. *Statistik Sosial Ekonomi*, Bagian Pertama, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga. Yogyakarta : BPFE.
- Handyaningrat. 2013. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*. Bandung.
- Hani Handoko . (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam. Hlm.360
- Huda Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. cetakan pertama (malang: setara press 2015)
- Hurlock, E. B. 1979. *Personality Development*. Second Edition. New Delhi : Mc Graw-Hill.
- Masry, Maringan, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2004
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176
- Moleong dan Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (erlangga 2011) hal 74.
- Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: LkiS
- Sarman. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (jakarta: rineka cipta 2011).
- Santoso Purwo. *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*. cetakan pertama (yogyakarta: pustaka pelajar 2003) hal 96

Solekhan, Moch. MAP. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan pertama (malang:setara press 2014)

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokusmedia. Bandung.

Widaja. HAW. *Otonomi desa*. Cetakan ketujuh.(jakarta:rajawali pers 2014)

REGULASI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Dokumen Sejarah Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso

Monografi Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso